

## ABSTRAK

Gagasan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan teritorial menjadi isu yang diperdebatkan di berbagai negara dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia, saat ini masih dalam upaya untuk sepenuhnya mewujudkan gagasan mengenai partisipasi masyarakat melalui program institusional Musrenbang. Walaupun banyak kritik yang diberikan, program tersebut terus dilaksanakan selama hampir satu dekade tanpa mengalami perubahan dan perbaikan signifikan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji faktor-faktor yang dapat mendorong proses pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan teritorial dengan menggunakan studi kasus di Borobudur dan Nantes (Perancis).

Borobudur dipilih atas keberadaan organisasi non pemerintah “Peta Hijau” yang berhasil mempraktekkan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemetaan di Borobudur, terlepas dari ketersediaan sumber daya yang terbatas. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah dokumen potensi dan masalah serta rekomendasi yang di kemudian hari dimasukkan dalam rencana desa. Selain itu, observasi yang dilakukan di Borobudur menangkap keengganan warga untuk berkontribusi pada program-program pemerintah karena skeptisme dan pengalaman buruk di masa lalu.

Sementara itu, Nantes menunjukkan perkembangan yang nyata dalam usahanya mengajak masyarakat dalam proses perencanaan teritorial. Melalui program resmi Dialogue Citoyen, Nantes berhasil menjembatani masyarakat dengan pengambil keputusan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Saat ini pemerintah Nantes masih terus berupaya untuk mewujudkan slogan baru *faire ensemble* (bekerja bersama) melalui berbagai program partisipatif dengan skala dan mitra kerja yang beragam.

Dari kedua lokasi yang aspek historis dan budayanya berlainan, komitmen tinggi dan kerjasama antar aktor adalah kunci yang mendukung perwujudan gagasan partisipasi masyarakat. Selain itu, transparansi dan kejelasan adalah faktor utama untuk memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai langkah awal untuk mematahkan skeptisme. Kedua studi kasus juga menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas sosial dalam kaitannya dengan konteks keberlanjutan lingkungan. Mengambil pembelajaran dari Borobudur dan Nantes, penting bagi pemerintah untuk memahami dan mendefinisikan kembali makna, batasan, kelebihan dan juga konsekuensi dari partisipasi masyarakat agar dapat menerapkan konsepnya dengan semestinya.

**Kata Kunci:** partisipasi masyarakat, perencanaan, perencanaan teritorial, pengambilan keputusan, pembangunan sosial